

PEDOMAN PENYUSUNAN RENSTRA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PERGURUAN TINGGI



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN
Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat
APRIL 2016

Outline

- A. Landasan Hukum
- B. Prinsip Dasar dalam Pengabdian kepada Masyarakat
- C. Acuan kebijakan
- D. Langkah Penyusunan Renstra

A. LANDASAN HUKUM

1. UNDANG-UNDANG RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang PENDIDIKAN TINGGI
2. PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI Nomor 49 Tahun 2014 tentang STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI
3. PERATURAN MENTERI RISTEK-DIKTI Nomor 44 Tahun 2015 tentang STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI

TUJUAN

1. MENYEJAHTERAKAN dan
2. MENCERDASKAN MASYARAKAT

SASARAN

1. MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN, KESEHATAN, DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT (IPM)
2. MENINGKATKAN PELIBATAN DOSEN DALAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
3. MENINGKATKAN DAYA SAING BANGSA

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2015
tentang
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI

Pasal 1.

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
4. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa
14. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat

Pasal 62

- (1) Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) PT wajib:
 - a. menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan **rencana strategis pengabdian kepada masyarakat** perguruan tinggi; , dst……..
- (2) Perguruan tinggi wajib:
 - a. memiliki **rencana strategis pengabdian kepada masyarakat** yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi;

B. PRINSIP DASAR DALAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Berbasis kewilayahan
2. Berdasarkan permasalahan, kebutuhan atau tantangan di masyarakat
3. Sinergi, multi disiplin, dan bermitra
4. Kegiatan terstruktur, dengan target luaran yang jelas dan dapat diukur
5. Berkelanjutan, tuntas, dan bermakna

C. BEBERAPA KEBIJAKAN YANG RELEVAN UNTUK DIACU

1. UNDANG-UNDANG RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang PENDIDIKAN TINGGI
2. PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI Nomor 49 Tahun 2014 tentang STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI
3. PERATURAN MENTERI RISTEK-DIKTI Nomor 44 Tahun 2015 tentang STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI
4. RENSTRA KEMENRISTEK-DIKTI 2015 – 2019
5. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL 2015 – 2019
6. RPJMD PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

DASAR PEMIKIRAN PEWILAYAHAN

1. Intelektual di suatu wilayah (provinsi) bertanggungjawab atas **Kesejahteraan, Kesehatan, dan Pendidikan masyarakat** di wilayahnya
2. Intelektual dari wilayah (provinsi) lain, atas permintaan masyarakat atau Pemprov setempat dapat membantu pemerintah daerah dengan jalan bekerjasama dengan PT di wilayah tersebut
3. Pewilayahan dilakukan dengan mempertimbangkan **permasalahan, kebutuhan atau tantangan** masyarakat di wilayahnya
4. Renstra PPM PT mengandung unsur **sinergistik** seluruh PT di suatu provinsi mengacu kepada **BIDANG UNGGULAN PT, ISU GLOBAL, ISU NASIONAL, RPJM Nasional, Pemda Provinsi** dan/atau Kabupaten/Kota
5. Renstra termaksud disusun dan dikoordinasikan bersama **Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLPT)**. *(catatan : sebelum LLPT ditetapkan oleh pemerintah maka dikordinasikan dengan Kopertis)*
6. PPM berlangsung **kontinu, jangka panjang** meliputi aspek politik- ekonomi- sosial-budaya-pertahanan, dan keamanan

TUJUAN PEWILAYAHAN PPM

1. Meningkatkan **kemanfaatan iptek** PT bagi kehidupan masyarakat di suatu wilayah (provinsi) dalam wujud perbaikan kesejahteraan, kesehatan, dan pendidikan
2. Meningkatkan ***pelibatan*** dan ***kualitas*** Dosen Pelaksana Pengabdian PT dalam melaksanakan Dharma PPM
3. **Mensinergikan** renstra dan program PPM seluruh PT di suatu wilayah (provinsi) yang merefleksikan **Kebhinekaan Intelektual** dalam meningkatkan kesejahteraan dan kecerdasan masyarakat
4. Meningkatkan **utilisasi fasilitas PT** dan institusi lain dalam mendukung aktivitas PPM PT

RENCANA STRATEGIS

1. Merencanakan masa depan melalui penyusunan Program, penyiapan sumber daya dan tata kelola, agar tujuan di masa depan tercapai
2. Rencana langkah demi langkah yang akan membawa institusi mencapai tujuan akhir sesuai dengan tujuan yang tersirat dalam pernyataan Visi dan Misi.
 - Fleksibel → dapat menampung kemungkinan adanya hal-hal yang tak terduga,
 - Dinamis → dapat berubah dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan, dengan tanpa mengubah tujuan akhir.





D. PROSES PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS PPM (RENSTRA PPM)

1. Pedoman Kebijakan PT dalam **pengelolaan PPM** selama kurun waktu minimal **5 (lima) tahun**
2. PPM dimaksud adalah **PPM PT** yang bersifat **Kewilayahan, Terintegrasi, Sinergistik dan Melembaga**
3. Program dan Kegiatan PPM PT mengacu kepada **UNGGULAN PT, ISU GLOBAL, ISU NASIONAL, RPJM Nasional** dan/atau **RPJM Pemda Provinsi** dan/atau **Kabupaten/Kota** (*catatan : tergantung luasan wilayah kegiatan PPM PT*)
4. Turunan dari RENSTRA-PPM adalah **Program dan Kegiatan PPM PT** yang bersifat **Kemitraan**, dilaksanakan secara **Kelompok, multidisiplin intra PT dan/atau antar PT**
5. Indikator Kinerja PPM yang bersifat kewilayahan adalah **Peningkatan Kesejahteraan, Kesehatan dan Pendidikan Masyarakat**
6. Indikator Kinerja PPM yang bersifat khusus setiap PT adalah **Indikator Kinerja PPM** yang ditetapkan DRPM

INDIKATOR KINERJA PPM PT

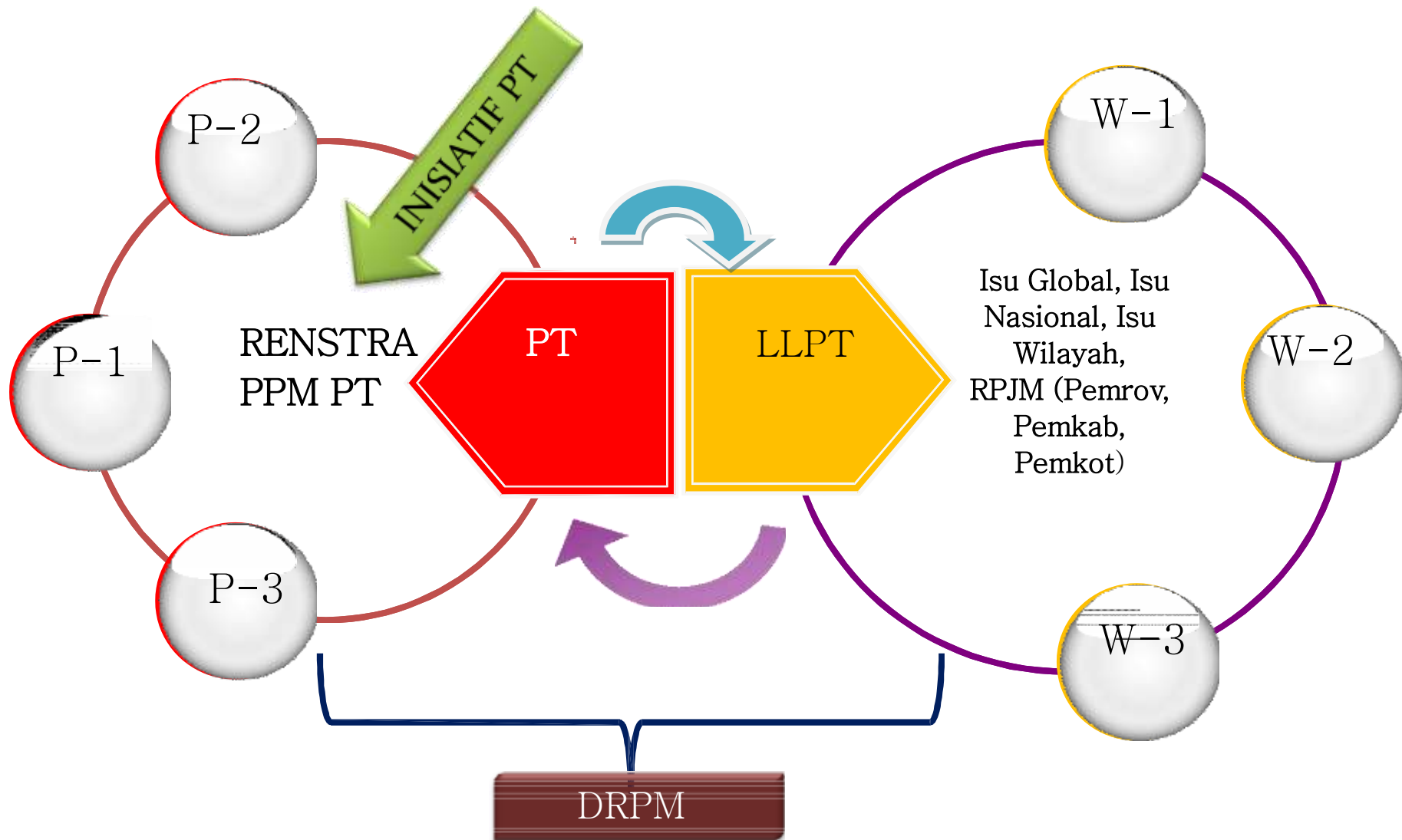
RUANG LINGKUP STANDAR NASIONAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

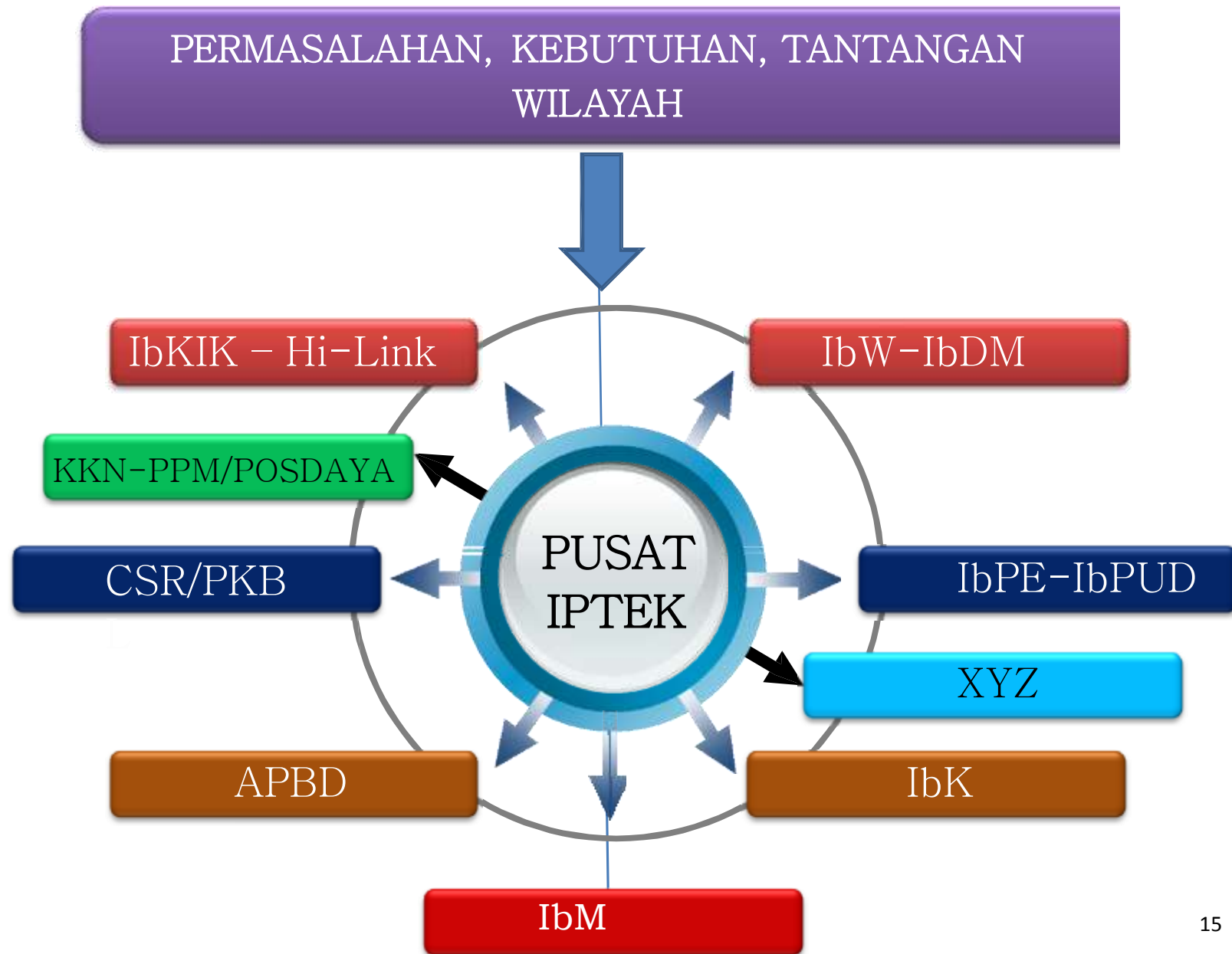
- Standar Hasil
- Standar Isi
- Standar Proses
- Standar Penilaian
- Standar Pelaksana
- Standar Sarana dan Prasarana
- Standar Pengelolaan
- Standar Pendanaan dan Pembiayaan

KEWAJIBAN PT

1. Bersama PT di satu Wilayah dan Pemda Mensinergikan RPJM dengan Kebhinekaan Intelektual dengan Memperhatikan Isu Global, Isu Nasional dan/atau Isu Wilayah
2. Menyusun RENSTRA-PPM PT
3. Menyusun Pedoman Pengelolaan PPM PT Berbasis Kewilayahan dan Inisiatif PT
4. Menetapkan Indikator Kinerja Mengacu Kepada Ketentuan DRPM
5. Meningkatkan Kinerja dan Kontribusi Dosen Pelaksana Pengabdian PT dalam Berbagai Tahapan Program PPM sesuai RENSTRA-PPM
6. Mengimplementasikan Sistem Teknologi Informasi dalam Pengelolaan Program PPM PT
7. Melakukan Diseminasi Hasil PPM PT dalam bentuk Jurnal Aplikasi Iptek dan/atau Seminar PPM
8. Melaporkan Hasil dan Dampak Kegiatan PPM Kepada DRPM
9. Secara Bersama-sama PT di satu Wilayah Meningkatkan Pelibatan Dosen dalam bidang Pengabdian kepada Masyarakat

SIKLUS PENYUSUNAN RENSTRA PPM PT





KERANGKA DASAR NASKAH RENSTRA-PPM

BAB I	: Pendahuluan
BAB II	: Landasan Pengembangan PPM PT
BAB III	: Garis Besar RENSTRA-PPM PT
BAB IV	: Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja
BAB V	: Pola Pelaksanaan, Pemantauan dan Evaluasi RENSTRA-PPM PT
BAB VI	: Penutup

BAB I. Pendahuluan

1. Uraian tentang Rencana Strategis PPM (RENSTRA-PPM) PT
2. Masa berlaku Pedoman Kebijakan PT dalam pengelolaan PPM selama kurun waktu minimal 5 (lima) tahun (2016-2020)
3. Penjelasan alur penyusunan RENSTRA-PPM PT memperhatikan **ISU GLOBAL** (Masyarakat Ekonomi Asean), **ISU NASIONAL** [Poros Maritim, Pembangunan Desa, Desa Perbatasan, Lima Komoditas Swasembada (Beras, Jagung, Kedele, Gula dan Sapi), Reformasi Budaya], **ISU WILAYAH** (Membangun Desa Mandiri), **RPJM NASIONAL/PEMDA**, dan **UNGGULAN PT**
4. Penetapan Kebhinekaan Intelektual, Kemitraan, Program dan Jenis Kegiatan yang akan dilaksanakan, Sumber Biaya Kegiatan dan Mitra PPM (PT, Pemda, Perusahaan, Masyarakat)
5. Dokumen lain yang Mendasari Penyusunan RENSTRA-PPM seperti, RENIP (Rencana Induk Pengembangan), Renstra Institusi, Keputusan Senat Universitas terkait Pengabdian kepada Masyarakat dan lain-lain

BAB II. Landasan Pengembangan PPM PT

Visi PT : Uraian Visi PT untuk Periode Tertentu

Misi PPM PT : Uraian Misi dan Kebijakan Umum PPM PT

1) Analisis Kondisi Saat ini (ringkasan **evaluasi diri**):

2) Jelaskan kondisi PPM selama ini, yang meliputi:

- Riwayat Perkembangan **PPM PT**
- Capaian Rencana yang Telah Dirancang Sebelumnya
- Peran Unit Kerja LPPM/LPM/P3M PT
- Kemitraan yang Pernah/Sedang Terlaksana
- Potensi yang dimiliki di Bidang PPM Meliputi: SDM, Sarana Prasana, Biaya, Informasi dan Manajemen Organisasi
- **SWOT : kondisi internal** yang mempengaruhi, meliputi **kekuatan dan kelemahan; kondisi eksternal** yang mempengaruhi, meliputi **peluang dan ancaman** yang dihadapi unit kerja LPPM/LPM /P3M PT dalam merealisasikan visi dan objektif yang telah dirumuskan

BAB III. Garis Besar RENSTRA-PPM PT

Tujuan dan Sasaran Pelaksanaan:

- Tujuan dan sasaran merupakan titik terukur untuk mencapai misi yang telah ditetapkan.
- Sasaran dirumuskan dengan mempertimbangkan EVALUASI DIRI berbasis analisis SWOT

Strategi dan kebijakan Unit Kerja:

1. Strategi pengembangan unit kerja LPPM/LPM/P3M PT berbasis masukan, proses, dan luaran
2. Formulasi strategi pengembangan (mengacu pada EVALUASI DIRI dan analisis SWOT)

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA

1. Berdasarkan Uraian dalam Bab III, dirumuskan Program dan Jenis Kegiatan **PPM PT** (tercakup di dalamnya organisasi dan manajemen) dan indikator kinerjanya
2. Program dan Jenis Kegiatan **PPM** Sinergistik berbasis Kebhinekaan Intelektual Kewilayahan, dibuat dalam bentuk matriks yang meliputi :
 - Isu Strategis Global, Nasional, Wilayah, RPJM
 - Jenis Permasalahan Prioritas
 - Solusi Iptek yang Tepat Bagi Permasalahan/ Kebutuhan/ Tantangan Masyarakat
 - Kemitraan PT, UMKM, CSR/PKBL dan Pemda
 - Kompetensi/Keahlian/Keilmuan Pelaksana
 - Indikator Kinerja sesuai KPI (*Key Performance Indicators*) yang Ditetapkan DRPM
3. Program PPM di Unit Kerja/Fakultas/Jurusan yang Merupakan Turunan RENSTRA-PPM

PENETAPAN PROGRAM DAN KEGIATAN PPM PT

Isu G- N- W/ RPJM	Isu Priorita s	Permasala han Prioritas	Solusi Permasalah an Prioritas	Program dan Jenis Kegiatan	Kemitraan PT /UMKM/CSR/ PKBL/Pemda	Sumber Dana				
						PT	CSR	Pemda	Dikti	Sumber lainnya

BAB V. POLA PELAKSANAAN, PEMANTAUAN, EVALUASI DAN DISEMINASI

1. Pada hakekatnya pelaksanaan RENSTRA-PPM PT sangat bergantung pada sumber dana:
 - a. Mandiri PT, APBN, APBD, CSR/PKBL
 - b. Dana lainnya dari berbagai sumber eksternal PT
2. Dalam naskah RENSTRA-PPM dilakukan perkiraan nominal dana PPM **yang diperlukan** untuk mencapai sasaran selama periode 5 (lima) tahun
3. Nominal dana yang **diperkirakan** dapat diperoleh dalam kurun waktu 5 (lima) tahun
4. Pola pemantauan dan evaluasi implementasi RENSTRA-PPM setiap tahun dan dampaknya bagi masyarakat mitra
5. Pola Diseminasi Hasil Kegiatan PPM PT

BAB VI. PENUTUP

1. Uraian tentang peluang keberlanjutan kegiatan dan program PPM PT setelah periode RENSTRA-PPM terlewati
2. Ucapan terimakasih bagi pihak-pihak yang berkontribusi signifikan pada penyusunan RENSTRA-PPM
3. Tim Penyusun Renstra

KISI-KISI NASKAH RENSTRA-PPM

1. **Tujuan RENSTRA:**
sesuai kondisi masyarakat di wilayah masing-masing
2. **Strategi Perencanaan :**
Sinergisme dalam Wujud Kebhinekaan Intelektual PPM PT 5 tahun kedepan
3. **Strategi Pelaksanaan :**
Kompetitif, *block grant*, *top down* atau *bottom up*
4. **Strategi Pendanaan:**
Dana mandiri PT, dana pewilayahan Dikti, Industri, APBD Pemda, atau kerjasama luar negeri dan sumber dana lainnya
5. **Strategi Pencapaian KPI (*Key Performance indicators*) :** Ada *based line*, ada peningkatan KPI setiap tahun
6. **Strategi Pencapaian Sesuai Bidang Kegiatan (Ekonomi, Kesehatan, dan Pendidikan)**
Ada *based line*, ada peningkatan KPI setiap tahun

ISU NASIONAL

Sasaran Pokok Rencana Teknokratik RPJMN 2015–2019
(Bappenas, 2014)

1. EKONOMI
2. PELESTARIAN SDA, LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGELOLAAN BENCANA
3. POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN, DAN KEAMANAN
4. KESEJAHTERAAN RAKYAT
5. KEWILAYAHAN
6. PEMBANGUNAN KELAUTAN